

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DI KABUPATEN MIMIKA

San Dominggo Albertus Lambel¹, Yahya Nusa²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan Timika

Email: stie@stiejb.ac.id

ABSTRAK

This study aims to analyze the effectiveness of Small and Medium Industries (SMEs) development policies in Mimika Regency, by highlighting internal (managerial capability) and external factors (market conditions, regulations, and government policies), as well as identifying obstacles and opportunities for their development. The research approach uses a quantitative descriptive method with the support of qualitative data. Primary data was obtained through questionnaires and interviews with SMEs, while secondary data was sourced from official documents of the Disperindag, BPS, and related regulations. The research instruments were tested by validity and reliability tests, then analyzed using effectiveness calculations through the percentage of target achievement. The results show that the overall effectiveness of SME development policies is still low, with an achievement of 34% (Ineffective). The Managerial Capability Indicator obtained the highest score of 89% (Moderately Effective), while Market Conditions only reached 76% (Less Effective), and Government Regulations and Policies were the weakest aspects with a score of 39% (Ineffective). Although there was positive growth in certain sectors such as DAMIU and tailoring, several other sectors such as chips, crocodile skin, and sago factories experienced stagnation. These findings indicate the need for more targeted policies through bureaucratic simplification, increased access to capital, market strengthening, and business training and assistance programs so that the development of SMEs in Mimika can grow more evenly and sustainably.

Keywords: *Policy effectiveness, Small and Medium Industries (SMEs), SME Development, Mimika Regency.*

PENDAHULUAN

Rita Kusumadewi (2023:200) Sektor industri adalah salah satu sektor yang memiliki peran penting sebagai penggerak

dan penopang perekonomian pada sebuah negara. Industrialisasi ekonomi yang diperkuat dengan inovasi dan teknologi, menjadi salah satu

kunci penting meraih pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi. Dalam perekonomian, sektor industri selalu memberikan lapangan kerja dan membuat produktivitas. Beberapa hal yang dapat mengoptimalkan industri ekonomi yang berdaya adalah regulasi yang kondusif, ketersediaan sumber bahan baku, iklim investasi yang sehat, kesempatan berusaha, serta ketersediaan sumber daya manusia industri.

Menurut Data Dari Portal Informasi Indonesia "UMKM Didorong Naik Kelas di Era Presiden Prabowo", Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bahkan menunjukkan perhatian khusus terhadap situasi ini. pemerintah ingin memahami secara mendalam berbagai permasalahan yang menjadi penyebab utama terjadinya perlambatan dalam perkembangan UMKM di seluruh Indonesia. Menurut Sudariyanto, (2020:1) Istilah industri didefinisikan sebagai kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Istilah industri juga digunakan bagi suatu bagian produksi ekonomi yang terfokus pada proses manufakturisasi tertentu yang harus memiliki permodalan yang besar sebelum dapat meraih keuntungan. Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peran penting dalam struktur

perekonomian Indonesia karena kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Menurut data BPS 2023, IKM menyumbang 99,7% dari total unit usaha dan memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di berbagai daerah, IKM menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika sedang menuju kemajuan dengan adanya usaha industri namun, beberapa sektor seperti keripik, kulit buaya, dan pabrik sagu menunjukkan stagnasi, mengindikasikan perlunya penguatan dari sisi akses pasar, modal, maupun pelatihan teknis. Usaha meubel, batako, dan noken menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat, meskipun stabil, dan cenderung mencapai titik jenuh pasar tanpa perluasan berarti. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan yang ada telah memberikan dampak yang baik pada sektor-sektor tertentu, masih diperlukan pendekatan yang lebih terarah dan spesifik terhadap jenis usaha yang stagnan (keadaan yang tidak bergerak), seperti pengolahan pangan lokal dan kerajinan khas daerah, agar pengembangan IKM di Mimika menjadi lebih merata, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Namun, realita di lapangan

menunjukkan bahwa pengembangan IKM di Mimika masih menghadapi berbagai hambatan. Secara umum, hambatan yang dihadapi oleh industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Mimika meliputi keterbatasan akses terhadap bahan baku dan peralatan produksi modern, minimnya pelatihan teknis dan manajerial, rendahnya daya saing produk akibat kualitas dan pengemasan yang belum standar, serta terbatasnya akses pasar dan infrastruktur pendukung seperti Peralatan, bahan, dan transportasi. Tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan akses

terhadap pembiayaan, minimnya pemanfaatan teknologi, lemahnya infrastruktur pendukung, hingga kendala birokrasi dalam pengurusan izin dan legalitas usaha. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti pelatihan UMKM Naik Kelas, pendampingan manajerial, dan insentif melalui program kementerian teknis, efektivitas kebijakan tersebut masih perlu diuji secara empiris di daerah-daerah dengan karakteristik geografis dan ekonomi yang unik seperti Mimika. Berikut adalah tabel rekap data usaha industri pertahun:

**Tabel 1. 1
Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Mimika Tahun 2020-2023**

No	Jenis Usaha	2020	2021	2022	2023
1	DAMIU	119	154	252	265
2	Meubel	101	101	101	117
3	Batako	67	67	67	79
4	Penjahit	64	64	64	105
5	Noken	89	113	113	113
6	Tahu Tempe	6	6	6	15
7	Keripik	3	3	3	4
8	Roti	14	14	14	14
9	Ice Cream	1	1	1	1
10	Kulit Buaya	3	3	3	3
11	Patung & Noken	79	85	87	90
12	Kerangka Bunga	2	2	4	4
13	Pabrik Sagu	1	1	1	1
Total		633	614	734	811

Sumber: Data Disperindag 2024

Secara umum, terdapat peningkatan jumlah unit usaha IKM dari tahun ke tahun, yang menunjukkan adanya perkembangan sektor IKM di Kabupaten Mimika. Tahun 2020 dimulai dengan angka rendah, namun hingga 2023 terjadi peningkatan yang signifikan pada beberapa jenis usaha tertentu, terutama DAMIU, Penjahit, Meubel dan berdasarkan rekap data usaha industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Mimika dari tahun 2020 hingga 2023, terlihat adanya pertumbuhan positif yang mencerminkan efektivitas sebagian kebijakan pengembangan IKM, terutama pada jenis usaha seperti DAMIU yang meningkat signifikan dari 119 unit pada tahun 2020 menjadi 265 unit pada 2023, serta usaha penjahit yang melonjak dari 64 menjadi 105 unit pada tahun yang sama. Kenaikan ini menunjukkan tingginya permintaan akan produk dasar seperti air minum dan jasa sandang, serta keberhasilan program pelatihan dan pendampingan usaha.

Namun, beberapa sektor seperti keripik, kulit buaya, dan pabrik sagu menunjukkan stagnasi, mengindikasikan perlunya penguatan dari sisi akses pasar, modal, maupun pelatihan teknis. Usaha meubel, batako, dan noken menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat, meskipun stabil, dan cenderung mencapai titik jenuh pasar tanpa

perluasan berarti. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan yang ada telah memberikan dampak yang baik pada sektor-sektor tertentu, masih diperlukan pendekatan yang lebih terarah dan spesifik terhadap jenis usaha yang stagnan (keadaan yang tidak bergerak), seperti pengolahan pangan lokal dan kerajinan khas daerah, agar pengembangan IKM di Mimika menjadi lebih merata, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, evaluasi terhadap kebijakan pengembangan IKM di Kabupaten Mimika menjadi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana program-program yang telah diluncurkan mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha. Penelitian ini tidak hanya akan menyoroti faktor-faktor internal seperti kapabilitas manajerial dan sumber daya manusia, tetapi juga faktor eksternal seperti kondisi pasar, infrastruktur, dan regulasi yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pengembangan IKM di Kabupaten Mimika, mengidentifikasi hambatan dan peluang, serta memberikan rekomendasi strategis guna menciptakan ekosistem IKM yang lebih kondusif dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan penjelasan

sebelumnya, peneliti ingin mengambil penelitian yang berjudul "Efektivitas Kebijakan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) di Kabupaten Mimika".

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian IKM (Industri Kecil dan Menengah)

Ellen, 2015 (Bakhri, 2020:1) Industri merupakan suatu usaha maupun kegiatan dalam pengelolaan bahan mentah ataupun barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil dari industri tersebut dapat berupa barang dan jasa. Barang di sini contohnya pada industri pakaian, industri makanan dan minuman serta industri furniture. Misalnya saja pada industri makanan dan minuman yang didapat dari pengolahan mangga, ikan pindang serta kacang kedelai. Dalam persaingan industri, menurut Amirullah, 2015 (Bakhri, 2020:1) para pelaku usaha akan saling mempengaruhi satu di antara lainnya. Biasanya, industri-industri mencakup kekayaan bauran dari beberapa strategi yang digunakan pelaku industri untuk memperoleh daya saing strategi dan laba di atas rata-rata.

Puji Lestari (2010:147) Industri kecil dan menengah atau yang sering disebut IKM merupakan salah satu tumpuan utama pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru

terutama setelah krisis ekonomi yang terjadi beberapa tahun yang lalu. IKM juga bagian penting dari perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Sebagai gambaran, walaupun sumbangan sektor IKM dalam output nasional (PDRB) tahun 2000 hanya 56,7 persen dan dalam ekspor non migas hanya 15 persen pada tahun 2000, namun IKM memberikan kontribusi sebanyak 99 persen dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta memiliki andil sebanyak 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja (Menuju UKM, 2001). Industri kecil dan menengah atau yang sering disebut IKM merupakan salah satu tumpuan utama pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru terutama setelah krisis ekonomi yang terjadi beberapa tahun yang lalu. IKM juga bagian penting dari perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Sebagai gambaran, walaupun sumbangan sektor IKM dalam output nasional (PDRB) tahun 2000 hanya 56,7 persen dan dalam ekspor non migas hanya 15 persen pada tahun 2000, namun IKM memberikan kontribusi sebanyak 99 persen dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta memiliki andil sebanyak 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja (Puji Lestari, 2010:146).

Kebijakan Industri

Subandi, (2011:276) Dalam konteks inilah, apabila Indonesia ingin berbicara banyak dalam pasar global, mau tidak mau distorsi yang

menghalangi fair competition harus dihilangkan. Momentum liberalisasi perdagangan dunia dan disepakatinya WTO agaknya merupakan external pressure untuk meniadakan berbagai proteksi yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Ini perlu dibarengi dengan berbagai persiapan kelembagaan, infrastruktur, dan suprastruktur dalam upaya meningkatkan daya saing di pasar global. Pengembangan usaha kecil dan koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan merupakan salah satu langkah strategik yang perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata dan tidak hanya berhenti pada retorika politik semata. Dengan langkah semacam itu, insya Allah, kita tidak hanya menjadi "penggembira" dalam persaingan global.

Agar dapat bersaing di pasar global, sudah saatnya iklim persaingan di dalam negeri dibenahi. Struktur industri Indonesia yang umumnya oligopolistik dan terkonsentrasi terbukti hanya "jago kandang". Pada gilirannya, ini menghasilkan struktur industri yang dangkal dan rentan terhadap gejolak eksternal, yang tercermin dari rendahnya kandungan teknologi, ketergantungan yang tinggi pada barang modal dan input antara dari luar negeri, serta lemahnya keterkaitan antarindustri Basri, 1997; Kuncoro, 2007 (Subandi, 2011:276).

Subandi, (2011:276) Sejarah mencatat bahwa dari dimensi kebijakan, pemerintah Indonesia

agaknya lebih condong "membantu" Industri Besar dan Menengah (IBM) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan industri, yang diformulasikan ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) selama pemerintahan Soeharto menitikberatkan pada: (1) industri-industri yang menghasilkan devisa dengan cara memproduksi barang-barang substitusi impor; (2) industri-industri yang memproses bahan-bahan mentah (industri dasar) dalam negeri dalam jumlah yang besar; (3) industri-industri padat karya; (4) perusahaan-perusahaan negara untuk tujuan strategis dan politis Prawiro, 1998; Soehoed, 1988, (Subandi, 2011:277). Negara telah terlibat dalam industri-industri manufaktur sebagai investor, pemilik, pengatur, dan pihak yang membiayai. Di antara negara-negara Asia, gaya development state semacam ini bukanlah cerita yang baru. Kendati demikian, interpretasi Neoliberal tentang Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan industri dinilai tidak koheren karena dibayangi para pemburu rente (rent seeking) dan tidak relevan dengan pembangunan serta keberhasilan ekspor Indonesia.

Kebijakan Industrialisasi

Wihana Kirana Jaya, (2008:162) Keunggulan teori keterkaitan industrial terletak pada kepeduliannya akan kemungkinan berkembangnya sektor lain, yaitu pada

keterkaitannya ke depan (*forward linkage*) maupun keterkaitan ke belakang (*backward linkage*). Sektor industrial diharapkan bisa berperan sebagai motor penggerak perkembangan sektor lain. Sedangkan kelemahan dari teori ini adalah kurang memperhatikan pertimbangan efisiensi. Industri yang dikembangkan memiliki kaitan luas, sehingga diprioritaskan, dan boleh jadi merupakan industri-industri yang memerlukan modal besar, menyerap banyak devisa, atau industri yang tidak memiliki keunggulan komparatif.

Wihana Kirana Jaya, (2008:162) Keunggulan teori penciptaan kesempatan kerja terletak pada titik tolaknya yang sangat manusiawi, yaitu dengan menempatkan manusia sebagai subjek (bukan objek) pembangunan. Teori ini sangat populis dan cocok bagi negara-negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk besar. Namun demikian, industri-industri yang dikembangkan berdasarkan penciptaan kesempatan kerja mungkin saja tidak memiliki kaitan luas dengan sektor-sektor lain, sehingga tidak dapat berperan sebagai sektor yang memimpin (*leading sector*).

Sedangkan keunggulan teori loncatan teknologi terletak pada optimisme teknologi, bahwa pengembangan industri berteknologi tinggi akan memacu kemajuan teknologi di sektor-sektor lain. Kelemahannya adalah teori ini bersifat "tidak

perlu biaya", tidak menghiraukan masalah ketersediaan modal, sehingga potensial boros devisa. Selain itu, teori ini juga kurang peduli akan kesiapan kultural masyarakat dalam menghadapi loncatan teknologi yang dikembangkan.

Kebijakan Pengembangan Industri

Peran terpenting pemerintah untuk memfasilitasi pengembangan perindustrian adalah dengan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi usaha. Salah satu bidang penting yang membutuhkan intervensi pemerintah Indonesia adalah infrastruktur yang menua dan tidak memadai, utamanya transportasi dan ketersediaan energi listrik Thebault-Weiser, 2008 (Budiarto, 2011:247).

Budiarto, (2011:247)Sementara itu, dalam Peraturan Presiden RI No. 28 tahun 2008 tentang kebijakan Industri Nasional dinyatakan bahwa pada tahun 2025, industri nasional diharapkan mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai struktur industri yang tersusun dari berbagai aspek untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Bangun Industri Nasional tahun 2025 disusun berdasarkan basis industri manufaktur dan industri andalan masa depan. Bangun industri masa depan tersebut dikembangkan terintegrasi dengan pengembangan sektor pertanian, kelautan, kehutanan,

pertambangan, sumber daya manusia industrial, serta pengembangan kemampuan penelitian dan pengembangan, termasuk pengembangan jasa pendukung, rancang bangun, dan perekayasaan industri.

Peranan Sektor Industri Dalam Pembangunan

Wihana kirana jaya, (2008:162) Peran sektor industri dalam pembangunan adalah untuk memberikan nilai tambah faktor-faktor produksi. Pada dasarnya, peranan sektor industri dalam pembangunan ini dikembangkan menjadi strategi industrialisasi yang meliputi Strategi Industri Substitusi Impor (SISI) atau import substitution dan Strategi Industri Promosi Ekspor (SIPE) atau export promotion.

SISI dikenal pula dengan istilah strategi orientasi ke dalam (inward looking strategy), yaitu strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan berbagai jenis industri yang menghasilkan barang-barang untuk menggantikan kebutuhan akan barang-barang impor dengan produk-produk sejenis. Sedangkan SIPE sering disebut dengan istilah strategi orientasi keluar (outward looking strategy), yaitu strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan berbagai jenis industri yang menghasilkan produk-produk untuk diekspor.

Wihana kirana jaya, (2008:162) Sektor industri

merupakan sektor utama dalam perekonomian Indonesia setelah sektor pertanian. Sektor ini sebagai penyumbang dalam pembentukan PDB Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 1999. Bahkan sejak tahun 1991, sektor industri ini mampu menjadi sektor utama (leading sector) dengan mengalahkan peran sektor pertanian dalam menyumbang pembentukan PDB.

Pengertian Industri Kecil dan Menengah

Pengertian Industri Kecil dan Menengah di Indonesia masih sangat beragam, namun dalam pengertiannya, menurut Partomo & Soejoedono, 2002 (Bakhri 2020:2) sedikitnya selalu mencakup dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan yang ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap oleh suatu perusahaan. Seperti halnya pengertian Industri Kecil.

Menurut Badan Pusat Statistik 2003 (Bakhri 2020:2), mendefinisikan industri kecil merupakan usaha rumah tangga yang melakukan kegiatan mengolah barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi, atau yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual.

Analisis Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata "efektif" yang mengandung makna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dan selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang serta dinilai dengan berbagai cara, dan memiliki keterkaitan erat dengan efisiensi. Efektif dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil dan berhasil guna. Menurut kumorotomo, 2005 (Widodo, 2013:9) efektifitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu tugas dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya, berhasil atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Menurut I Nyoman Sumaryadi, (Widodo 2013:9) Efektifitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya, efektifitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi yang

ditetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan, dan apabila unit organisasi yang didalam melaksanakan kegiatan keluar tidak mencapai tujuan organisasi, maka unit tersebut dikatakan tidak efektif. Efektifitas merupakan pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil. Siagian, 2002 (Widodo, 2013:10) apabila seseorang berbicara tentang efektifitas sebagai orientasi kerja berarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk mencapai kegiatan tersebut. arti jumlah jenis sumber-sumber yang sudah digunakan harus ditentukan sebelumnya dan dengan memanfaatkan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan pula.

Dalam Sugiyono, 2013 (Zahrah and Arifin, 2021:1154) analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul Sugiyono, 2013 (Zahrah and Arifin, 2021:1154). Kegiatan tersebut adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan tiap variabel yang diteliti dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang sudah ditentukan. Analisis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis efektivitas. Subagyo, 2000 (Zahrah and Arifin, 2021:1154), menjelaskan tingkat efektifitas dapat dihitung menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{R}{T} \times 100\%$$

Keterangan:

R=Realisasi

T=Target

Teknik analisis yang dilakukan dengan cara melakukan perhitungan sesuai rumus yang digunakan. Menentukan persentase terhadap keseluruhan pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dan menentukan efektivitas pelaksanaan penelitian dalam efektivitas kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) di

Kabupaten Mimika dengan cara menjumlah skor total (riil) yang diperoleh dibagi dengan jumlah skor ideal (harapan) setelah itu dikali 100% Sugiyono, 2013 (Zahrah and Arifin, 2021:1154). Menurut Yulistiana, 2008 (Zahrah and Arifin, 2021:1154) rumus efektivitas secara matematis adalah:

$$Efektivitas = \frac{Skor\ Riil}{Skor\ Harapan} \times 100\%$$

dimana:

Skor Riil = Σ Frekuensi Jawaban Responden x Skor Nilai Jawaban
 Skor Harapan = Σ Responden x Skor Tertinggi x Jumlah Item

Tabel 2. 1
Standar Ukuran Efektivitas

Percentase Efektivitas	Kriteria
100%	Sangat Efektif
90% – 99%	Efektif
80% – 89%	Cukup Efektif
60% – 79%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

RANCANGAN PENILITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk angka-angka, kemudian dianalisis secara statistik sederhana sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas kebijakan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Mimika.

Penelitian ini dilakukan pada industri kecil dan menengah di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Objek penelitian ini yaitu kebijakan yang ada dan bagaimana kebijakan tersebut dirancang untuk mendukung IKM, Implementasi kebijakan tersebut di lapangan dan dampaknya terhadap IKM, Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan IKM, dan Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kontribusi IKM terhadap pembangunan daerah.

Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh (sensus), yaitu upaya untuk memasukkan seluruh populasi pelaku IKM yang terdaftar dalam wilayah penelitian sebagai responden. Meskipun pendekatan sensus diterapkan, jumlah responden

akhir yang berhasil dikumpulkan sebanyak 50 (lima puluh) unit usaha IKM.

Instrumen Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan aplikasi SPSS semata-mata sebagai alat bantu untuk melakukan uji efektivitas guna menganalisis data kuantitatif termasuk hasil survei, data IKM, maupun capaian kebijakan dengan tujuan menguji hipotesis tentang keberadaan dan kekuatan hubungan antara kebijakan pengembangan IKM dan indikator perkembangan IKM di Kabupaten Mimika. Melalui uji efektivitas, kondisi riil IKM dipetakan berdasarkan frekuensi dan proporsi kategori misalnya tingkat adopsi kebijakan, kinerja produksi, atau partisipasi pelaku IKM, sehingga keterkaitan antara variabel kebijakan strategis, faktor internal seperti kapasitas teknis dan akses modal, serta faktor eksternal infrastruktur dan pasar dapat dievaluasi secara objektif. Selain itu, SPSS membantu membandingkan distribusi data sebelum dan sesudah intervensi kebijakan untuk menilai signifikansi perubahan, memastikan instrumen survei valid melalui analisis frekuensi dan tabulasi silang, serta menyajikan output hasil uji Efektivitas dalam tabel yang jelas untuk memudahkan pemangku kepentingan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan

berkelanjutan.

Subagyo, 2000 (Zahrah and Arifin, 2021:1154)

menjelaskan tingkat efektifitas dapat dihitung menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{R}{T} \times 100\%$$

Keterangan:

R=Realisasi T=Target

Teknik analisis yang dilakukan dengan cara melakukan perhitungan sesuai rumus yang digunakan. Menentukan persentase terhadap keseluruhan pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dan menetukan efektivitas pelaksanaan penelitian dalam efektivitas kebijakan pengembangan industri kecil dan

menengah (IKM) di Kabupaten Mimika dengan cara menjumlah skor total (riil) yang diperoleh dibagi dengan jumlah skor ideal (harapan) setelah itu dikali 100% Sugiyono, 2013 (Zahrah and Arifin, 2021:1154). Menurut Yulistiana, 2008 (Zahrah and Arifin, 2021:1154) rumus efektivitas secara matematis adalah:

$$Efektivitas = \frac{Skor\ Riil}{Skor\ Harapan} \times 100\%$$

Dimana:

Skor Riil = Σ Frekuensi Jawaban Responden x Skor Nilai Jawaban

Skor Harapan = Σ Responden x Skor Tertinggi x Jumlah Item

Tabel 3. 1
Standar Ukuran Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria
100%	Sangat Efektif
90% – 99%	Efektif
80% – 89%	Cukup Efektif
60% – 79%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Sekunder, 2025

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Deskripsi Responden

Penelitian ini melibatkan 50 pelaku IKM di Kabupaten Mimika yang berasal dari berbagai kecamatan dengan jenis usaha yang beragam, mencerminkan potensi sektor IKM di daerah ini. Mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki yang umumnya bergerak pada usaha berintensitas fisik seperti meubel, produksi batako, dan konstruksi ringan, sedangkan responden perempuan lebih banyak berperan di bidang konveksi, pengolahan makanan dan minuman, serta kerajinan tangan. Dari segi pengalaman usaha, sebagian besar telah menjalankan usahanya selama 3-5 tahun, diikuti oleh pelaku yang beroperasi lebih dari 5 tahun, termasuk yang mampu bertahan lebih dari satu dekade, serta pelaku baru dengan masa usaha kurang dari dua tahun. Ragam bidang usaha mencakup meubel, produksi batako, depot air minum isi ulang, konveksi, kuliner, dan kerajinan tangan, yang menunjukkan perkembangan di berbagai sektor baik yang berfokus pada kebutuhan pokok maupun produk kreatif. Tingkat pendidikan responden didominasi oleh lulusan SMA/sederajat, disusul oleh lulusan perguruan tinggi dan SMP.

Deskripsi Variabel

Faktor-faktor yang diamati dan dianalisis dalam penelitian ini

mencakup 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa kapabilitas manajerial, sedangkan faktor eksternal berupa kondisi pasar serta regulasi dan kebijakan pemerintah.

Analisis Menggunakan SPSS

Penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS untuk menganalisis data kuantitatif, seperti hasil survei dan capaian kebijakan. Seluruh data yang terkumpul akan diolah menggunakan SPSS. Output dari analisis ini akan diinterpretasikan melalui beberapa teknik statistik berupa Uji Validitas, dan Uji Reabilitas.

a. Uji Validitas

Menurut Kuncoro (2003), uji validitas adalah ukuran seberapa akurat sebuah instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Semakin tinggi tingkat validitasnya, semakin tepat instrumen tersebut dalam menjalankan fungsinya. Suatu indikator dikatakan valid jika nilai r hitungnya lebih besar dari r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 (Maholtra, 1996).

Dengan kata lain, uji validitas digunakan untuk menentukan apakah setiap butir pertanyaan dalam kuesioner valid atau tidak. Dalam penelitian ini, dengan jumlah responden (N) sebanyak 50. Berdasarkan tabel koefisien korelasi dengan tingkat signifikansi 5%

(0,05), nilai r tabel yang diperoleh adalah 0,279. Untuk memberikan gambaran dari uji

validitas dalam penelitian ini maka ditunjukkan data tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 4
Hasil Uji Validitas

Nomor Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
1.	0,300	0,279	valid
2.	0,358	0,279	valid
3.	0,406	0,279	valid
4.	0,392	0,279	valid
5.	0,320	0,279	valid
6.	0,314	0,279	valid
7.	0,320	0,279	valid
8.	0,634	0,279	valid
9.	0,591	0,279	valid
10.	0,655	0,279	valid
11.	0,607	0,279	valid
12.	0,668	0,279	valid

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 5.5 maka dapat dinyatakan bahwa seluruh item pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid, karena setiap item pertanyaan di atas nilai r hitung melebihi dari r tabel yaitu 0,0,279. Pada tabel di atas item yang memiliki nilai validitas tertinggi terdapat pada nomor 12 sebesar 0,668. Sedangkan nilai validitas terendah terdapat pada nomor 1 dengan nilai sebesar 0,300.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya,

handal dan konsisten dalam pengukuran. Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya, handal dan konsisten dalam pengukuran. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan internal konsistensi menggunakan Cronbach alpha. Jika kuesioner dikatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,6$ (Amanda, dkk. 2019:187). Hasil pengujian reliabilitas instrument penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 5
Hasil Uji Reliabilitas

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
0,695	12

Sumber: SPSS, 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai *Cronbach's Alpha* memperoleh nilai sebesar 0,695. Dimana pada skor tersebut berada di atas 0,6 sehingga dapat dinyatakan reliabel, handal, atau konsisten dalam pengukuran.

Kriteria Efektivitas Kebijakan

Untuk menilai efektivitas kebijakan, digunakan acuan kriteria efektivitas sesuai Kepmendagri. kriteria efektivitas suatu program adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 6
Percentase Efektivitas

Percentase Efektivitas (%)	Kategori
0,800 sampai dengan 1,000	Sangat Efektif
0,600 sampai dengan 0,799	Efektif
0,400 sampai dengan 0,599	Cukup Efektif
0,200 sampai dengan 0,399	Kurang Efektif
0,000 sampai dengan 0,199	Sangat Kurang Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327/2006

Perhitungan Indeks Efektivitas Kebijakan

Berdasarkan data 50 responden IKM, jumlah pertanyaan yang dianalisis sebanyak 12 indikator (setiap pertanyaan menggunakan skala 1-5). Skor ideal per responden adalah $5 \times 12 = 60$. Sehingga

untuk 50 responden, skor ideal keseluruhan = $50 \times 60 = 3000$. Dari rekap data diperoleh skor aktual total = 1941 (dengan asumsi pertanyaan tidak terjawab diganti skor netral 3). Dengan demikian, persentase efektivitas kebijakan dihitung sebagai:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Skor Riil}}{\text{Skor Harapan}} \times 100\%$$

Percentase efektivitas =

$$(\text{Skor Aktual} / \text{Skor Ideal}) \times 100\% = (1941 / 3000) \times 100\% = 64,7\%.$$
 Percentase 64,7 % ini termasuk dalam rentang 60–80 %, yang menurut tabel kriteria di atas tergolong Kurang Efektif. Dengan kata lain, efektivitas kebijakan

pengembangan IKM di Kabupaten tergolong kurang optimal berdasarkan perhitungan tersebut.

Untuk memperjelas hasil ini, berikut disajikan rekapitulasi perhitungan:

Tabel 5. 7
Perhitungan Indeks

Keterangan	Nilai
Skor Aktual (total)	1.941
Skor Ideal	3.000
Percentase Efektivitas	64,7 %
Kategori Efektivitas	Kurang Efektif

Sumber: data diolah 2025

Berdasarkan tabel di atas, persentase efektivitas sebesar 64,7 % menempatkan kebijakan pada kategori Kurang Efektif.

Tabel 5. 8
Sampel Penelitian Berdasarkan Jenis Usaha (n = 50 responden)

Jenis Usaha	Jumlah IKM
Mebel	23
Batako / Percetakan	19
Bengkel Las / Pagar Besi	2
Depot Air Minum	1
Pabrik Tempe dan Tahu	1
Toko Rakai Bunga	1
Kaca / Cetak Kaca	1
Peti Mati dan Bunga	1
Jual / Buat Kue	1

Sumber: data diolah 2025

Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan pengembangan IKM di Kabupaten Mimika telah mencapai target yang diharapkan. Pengukuran ini menggunakan pendekatan perbandingan antara skor riil hasil kuesioner dengan skor harapan (maksimum) untuk setiap indikator penelitian. Persentase efektivitas dihitung dengan membagi skor riil dengan skor harapan, kemudian dikalikan 100%, dengan kriteria penilaian Sangat Efektif (90-100%), Cukup Efektif (80-89%), Kurang Efektif

(60-79%), dan Tidak Efektif (<60%).

c. Kapasitas Manajerial

Indikator faktor internal berupa kapasitas manajerial merupakan ukuran sejauh mana program-program pengembangan IKM dapat meningkatkan kapasitas manajerial pelaku IKM di Kabupaten Mimika. Hasil penelitian dari 50 pelaku IKM yang menjadi responden penelitian ini terhadap empat instrumen ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5. 9
Hasil Analisis Efektivitas dari Kapasitas Manajerial

No.	Instrumen	Skor Riil
1	Saya bisa mengatur keuangan usaha saya dengan rapi dan tercatat	221
2	Saya paham cara memasarkan produk saya ke masyarakat	221
3	Saya tahu bagaimana menghitung untung dan rugi usaha saya	225
4	Saya merasa mampu mengambil keputusan penting dalam usaha	226
Jumlah Skor Riil		893
Skor Harapan		1.000
Efektivitas		89%
Interpretasi		Cukup Efektif

Sumber: Data diolah, 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai efektivitas program-program pengembangan IKM untuk mendukung kapasitas

manajerial pelaku usaha IKM di Kabupaten Mimika sebesar 89% yang berada pada rentang skala 80-89%. Hal ini menunjukkan bahwa program

program pengembangan IKM cukup efektif untuk mendukung kapasitas manajerial pelaku usaha IKM di Kabupaten Mimika.

d. Kondisi Pasar

Indikator faktor eksternal berupa kondisi pasar merupakan ukuran sejauh mana program-program

pengembangan IKM dapat menyesuaikan dengan kondisi pasar yang dialami pelaku IKM di Kabupaten Mimika. Hasil penelitian dari 50 pelaku IKM yang menjadi responden penelitian ini terhadap tiga instrumen ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5. 10
Hasil Analisis Efektivitas dari Kapasitas Manajerial

No.	Instrumen	Skor Riil
1	Permintaan terhadap produk saya cukup tinggi di pasar lokal	172
2	Saya mengetahui siapa saja pesaing produk sejenis di wilayah Mimika	220
3	Saya bisa menyesuaikan produk saya dengan kebutuhan pasar	175
Jumlah Skor Riil		567
Skor Harapan		750
Efektivitas		76%
Interpretasi		Kurang Efektif

Sumber: Data diolah, 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai efektivitas program-program pengembangan IKM menyesuaikan dengan kondisi pasar pelaku usaha IKM di Kabupaten Mimika sebesar 76% yang berapa pada rentang skala 60-79%. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pengembangan IKM kurang efektif untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar pelaku usaha IKM di Kabupaten Mimika. Tidak

Efektif (<60%).

e. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Indikator faktor eksternal berupa regulasi dan kebijakan pemerintah merupakan ukuran sejauh mana program-program pengembangan IKM didukung oleh regulasi dan kebijakan yang dibuat pemerintah kepada pelaku IKM di Kabupaten Mimika. Hasil penelitian dari 50 pelaku IKM yang menjadi

responden penelitian ini terhadap lima instrumen ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5. 11
Hasil Analisis Efektivitas dari Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

No.	Instrumen	Skor Riil
1	Saya mengetahui adanya program pemerintah untuk mendukung pelaku IKM di Mimika	91
2	Saya pernah mendapatkan bantuan peralatan, pelatihan, atau modal dari pemerintah	72
3	Saya merasa prosedur pengajuan bantuan usaha dari pemerintah cukup jelas dan mudah	110
4	Pemerintah sering melakukan pendampingan usaha atau kunjungan ke pelaku IKM	114
5	Saya merasa kebijakan yang ada benar-benar membantu pertumbuhan usaha saya	85
Jumlah Skor Riil		472
Skor Harapan		1.250
Efektivitas		38%
Interpretasi		Tidak Efektif

Sumber: Data diolah, 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai efektivitas program-program pengembangan IKM didukung oleh regulasi dan kebijakan pemerintah terhadap pelaku usaha IKM di Kabupaten Mimika sebesar 38% yang berapa pada rentang skala < 60%. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dan kebijakan pemerintah terhadap pelaku

usaha IKM di Kabupaten Mimika tidak efektif mendukung program-program pengembangan IKM.

Berdasarkan perhitungan dari ketiga indikator di atas, dapat diukur tingkat efektivitas kebijakan pengembangan IKM di Kabupaten Mimika. Kemudian hasil dari masing-masing indikator

direkapitulasi dan digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas kebijakan

pengembangan IKM di Kabupaten Mimika secara keseluruhan, sebagai berikut:

Tabel 5. 12
Rekapitulasi Hasil Analisis Efektivitas Kebijakan Pengembangan IKM di Kabupaten Mimika

No.	Indikator	Skor Riil	Skor Harapan	Efektivitas (%)	Kriteria
1.	Kapabilitas Manajerial	839	1.000	89	Cukup Efektif
2.	Kondisi Pasar	567	750	76	Kurang Efektif
3.	Regulasi dan Kebijakan Pemerintah	472	1.250	38	Tidak Efektif
Efektivitas Kebijakan Pengembangan IKM di Kabupaten Mimika		1.932	3.000	64	Kurang Efektif

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis efektivitas dari keempat indikator, dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas kebijakan pengembangan IKM di Kabupaten Mimika secara keseluruhan adalah berada pada kriteria kurang efektif dengan perolehan nilai efektivitas sebesar 64%. Perolehan nilai efektivitas ini dapat diartikan bahwa pelaku usaha IKM beranggapan bahwa program-program yang dijalankan masih kurang sesuai dengan

harapan. Diketahui juga bahwa indikator Kapasitas Manajerial merupakan indikator dengan nilai efektivitas yang tertinggi, yaitu 89% dan indikator Regulasi dan Kebijakan Pemerintah merupakan indikator dengan nilai efektivitas yang terendah, yaitu 38%.

Pembahasan

Pelaksanaan

pengembangan IKM di Kabupaten Mimika dapat dikatakan masih berjalan kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari

beberapa indikator dalam penelitian ini dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Kapasitas Manajerial

Faktor kapasitas manajerial menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 89% yang termasuk dalam kategori cukup efektif. Hasil ini mengindikasikan bahwa pelaku IKM di Kabupaten Mimika telah memiliki kemampuan yang relatif baik dalam mengelola kegiatan usahanya, mulai dari pengaturan keuangan, perencanaan pemasaran, hingga pengambilan keputusan usaha. Kondisi ini mencerminkan adanya kesiapan internal pelaku usaha dalam menghadapi dinamika bisnis, meskipun belum sepenuhnya optimal. Nilai efektivitas yang belum mencapai kategori sangat efektif memperlihatkan bahwa masih terdapat aspek-aspek manajerial yang perlu diperkuat, terutama terkait inovasi dalam strategi pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, serta penerapan sistem manajemen yang lebih modern. Dengan demikian, kapasitas manajerial yang dimiliki pelaku IKM sebenarnya telah menjadi modal penting, tetapi tetap memerlukan intervensi berkelanjutan agar mampu meningkatkan daya saing

usaha dalam jangka panjang.

b. Kondisi Pasar

Indikator kondisi pasar memperoleh efektivitas sebesar 76% dan berada pada kategori kurang efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pelaku IKM sudah memahami keberadaan pesaing serta memiliki kemampuan dasar dalam menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen, daya serap pasar terhadap produk IKM belum cukup tinggi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh keterbatasan kualitas produk, kapasitas produksi yang masih rendah, serta akses pasar yang terbatas pada wilayah lokal. Situasi tersebut menandakan bahwa pelaku IKM belum sepenuhnya mampu memanfaatkan peluang pasar yang ada, baik di tingkat regional maupun nasional. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang lebih kuat dalam bentuk fasilitasi promosi, penguatan jaringan distribusi, serta pemberian akses terhadap informasi pasar. Upaya ini diharapkan dapat membantu pelaku IKM meningkatkan daya saing produk, memperluas pangsa pasar, dan pada akhirnya mendorong keberlanjutan usaha.

c. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Adapun faktor regulasi dan kebijakan pemerintah memperoleh efektivitas terendah, yaitu sebesar 38% dengan kategori tidak efektif. Capaian ini menegaskan bahwa peran pemerintah dalam mendukung pengembangan IKM di Kabupaten Mimika masih sangat terbatas. Rendahnya efektivitas dapat dilihat dari minimnya informasi program yang diterima pelaku usaha, sulitnya prosedur pengajuan bantuan, serta rendahnya intensitas pendampingan yang diberikan kepada IKM. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan implementasi yang berlangsung di lapangan. Apabila hal ini tidak segera diperbaiki, maka keberadaan kebijakan justru tidak memberikan dampak nyata terhadap perkembangan IKM. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penyederhanaan prosedur birokrasi, peningkatan transparansi penyaluran bantuan, serta optimalisasi program pendampingan. Dengan demikian, regulasi dan kebijakan pemerintah dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang mendorong pertumbuhan

IKM serta menciptakan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Mimika.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Mimika secara keseluruhan berada pada kategori kurang efektif dengan capaian nilai sebesar 64%. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkat efektivitas pada setiap indikator yang diteliti. Kapasitas manajerial pelaku IKM menunjukkan hasil paling tinggi dengan efektivitas 89% (cukup efektif), menandakan bahwa pelaku usaha relatif telah memiliki kemampuan dasar dalam mengelola usahanya. Sementara itu, kondisi pasar hanya mencapai 76% (kurang efektif), yang mengindikasikan bahwa pelaku IKM masih menghadapi kendala dalam memperluas jaringan pemasaran dan menghadapi persaingan. Adapun regulasi dan kebijakan pemerintah memperoleh nilai terendah yaitu 38% (tidak efektif), mencerminkan masih lemahnya peran pemerintah dalam memberikan dukungan nyata kepada pelaku IKM. Dengan demikian, efektivitas kebijakan pengembangan IKM di Kabupaten Mimika belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha dan masih memerlukan perbaikan signifikan, terutama pada aspek

regulasi dan dukungan pemerintah.

Saran

Dari kesimpulan sebagaimana telah disebutkan di atas maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan frekuensi dan kualitas pendampingan IKM. Pemerintah daerah seyogianya lebih proaktif melakukan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pelaku IKM. Misalnya dengan program mentoring intensif, pelatihan rutin, atau kunjungan lapangan berkala. Dengan pendampingan yang lebih sering, pelaku IKM akan dibantu dalam mengatasi kendala teknis dan meningkatkan keterampilan manajerialnya.
- b. Memperluas dan memperjelas bantuan peralatan dan modal. Pemerintah perlu menyalurkan bantuan alat produksi dan modal secara lebih signifikan dan tepat sasaran. Skema bantuan harus dipermudah aksesnya, disertai sosialisasi yang lebih luas agar banyak pelaku IKM yang terdampak. Bantuan berupa mesin produksi, fasilitas kerja, atau subsidi permodalan kecil dapat memperkuat kapasitas usaha para pelaku IKM.
- c. Menyederhanakan prosedur program bantuan. Ditemukan bahwa sebagian pelaku IKM
- menganggap prosedur pengajuan bantuan masih rumit. Oleh karena itu, prosedur administrasi perlu dipangkas dan dibuat lebih transparan. Dengan proses yang mudah, diharapkan lebih banyak pelaku IKM tertarik dan mampu memanfaatkan program pemerintah.
- d. Menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga keuangan.
- e. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga keuangan (bank/LPD) untuk mendukung IKM melalui pembiayaan mikro atau penyediaan teknologi. Kolaborasi semacam ini membantu pelaku IKM memperoleh akses modal dan pasar yang lebih luas.
- f. Meningkatkan sosialisasi kebijakan IKM. Banyak responden tidak mengetahui program pemerintah yang ada. Sosialisasi program harus lebih gencar, misalnya lewat media lokal, kelompok tani, atau kelompok usaha, sehingga tujuan dan manfaat setiap kebijakan IKM dapat dipahami dengan baik oleh sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Bakar, Abu. 2016. "Identifikasi Sektor Ekonomi Unggulan

- Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua." Jurnal Kritis Kebijakan Riset Dan Inovasi 1(2)"<Https://Www.Ejournal.Stiejb.Ac.Id/Index.Php/Jurnal-Kritis/Article/View/62.> deepublish.
- Marijan, k. (2005). Mengembangkan industri kecil menengah melalui pendekatan kluster. Jawa timur: *insan*
- Bakhri, s. (2020). Membangun ekonomi masyarakat melalui pengembangan (industri kecil menengah). Yogyakarta: *K-media*
- Budiarto, r. (2011). *Kebijakan energi : menuju pengelolaan energi berkelanjutan.* Banguntapan: samudra biru.
- Henry kurniawan, g rusmayadi, kah achjar, p merliza, d suprayitno, a subiyantoro, y kusumastuti, h heirunissa, ta nengsih, i. H. (2024). *Buku ajar statistika dasar.* Jambi: pt. Sonpedia publishing indonesia.
- Indonesia, r. (2021). Peraturan menteri perindustrian republik indonesia nomor 14 tahun :2021 tentang pengembangan industri kecil dan industri menengah di sentra [lkm melalu] one village one product.
- Jhingan. L.m. (2016). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan.* Jakarta: Rita kusumadewi, heri fitriadi, arista fauzi kartika sari, akbar luf zulfkar, prima yustitia nurul islami, dania hellin amrina, ferdian badri, a'rasy fahrullah, fadhil rasyid, yan putra timur, dyah permata sari, nada arina romli, dini saftri, arini fitria, r. I. T. (2023). *Perkembangan ekonomi kreatif & ekonomi industri*
- Muhammad suhardi. (2023). *Buku ajar dasar metodologi penelitian.* Lombok tengah: p4i.
- Puji lestari, e. (2010). Penguatan ekonomi industri kecil dan menengah melalui platform klaster industri. *Jurnal organisasi dan manajemen*, 6(2), 146–157. <Https://doi.org/10.33830/jom.v6i2.289.2010>
- Republik indonesia. (2008). Peraturan presiden nomor 28 tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional, (september), 1–2. Retrieved from <Https://peraturan.bpk.go.id/home/download/70685/perpres no 28 th 2008.pdf>

- berbasis digital. Jawa barat: adab.
- Subandi (m.m.). (2011). *Ekonomi pembangunan*. Bandun: alfabeta. Sudariyanto, s. P. (2020). *Industrialisasi*. Semarang: alprin.
- Widodo, w. (2013). Efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan dalam pelayanan administrasi pada kantor camat tanah putih kabupaten rokan hilir. *Stisipol dharma wacana jalan kenanga*, 3(2), 34111.
- Zahrah, g. R., & arifin, j. (2021). Efektivitas program pkk dalam pemberdayaan wanita di desa barimbun kecamatan tanta kabupaten tabalong (study kasus usaha peningkatan pendapatan keluarga). Tabalong: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong.
- Wihana kirana jaya. (2008). *Ekonomi industri edisi 2*. Yogyakarta: bpfe.